BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dilapangan, penulis mendapatkan data yang kemudian dilakukan penyajian dan analisis data yang dituangkan dalam hasil dan pembahasan. Deskripsi umum yang didapatkan mengenai DPRD dan Partai Politik di Provinsi NTB adalah terkait tentang studi profil 65 orang wakil rakyat yang duduk dikursi legislatif sebagai orangorang yang dianggap mampu untuk mengembangkan daerah dalam segala aspek khususnya aspek politik.

Jika dilihat dari aspek sumber daya manusia, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menilai karakteristik anggota DPRD NTB, diantaranya karakteristik anggota DPRD berdasarkan asal partai, karakteristik anggota DPRD berdasarkan pendidikan, karakteristik anggota DPRD berdasarkan usia, karakteristik anggota DPRD berdasarkan okupasi, karakteristik anggota DPRD berdasarkan okupasi, karakteristik anggota DPRD berdasarkan gender, dan karakteristik anggota DPRD berdasarkan asal daerah (Kabupaten/Kota).

Dari enam indikator yang digunakan terdapat beberapa problematika, diantaranya yang berkaitan dengan keberadaan politisi muda yang dirasa masih sangat sedikit jika dibandingan dengan politisi golongan tua, padahal kehadiran politisi muda sangat diharapkan untuk memberikan warna baru dalam dunia politik. Partisipasi politisi muda di legislatif diharapkan mampu memberikan terobosan dan perubahan baru melalui suatu kebijakan yang

dikeluarkan yang sesuai dengan harapan-harapan kalangan muda. Anggota dewan golongan muda juga dianggap lebih responsif dan kritis terhadap perubahan zaman sehingga dalam menentukan suatu kebijakan dapat sesuai dengan kondisi sekarang.

Selanjutnya, terkait dengan partisipasi perempuan di DPRD NTB juga mejadi problematika yang cukup penting. Keterwakilan satu orang perempuan yang duduk dikursi legislatif dirasa masih sangat kecil atau dapat dikatakan tidak ada. Sehingga untuk memperjuangkan aspirasi dan melahirkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan masih sangat lemah. Keterwakilan perempuan di legislatif sebenarnya sangat diharapkan agar mampu mengakomodasi kebijakan dan memberikan perspekif dari perempuan terkait dengan kepentingan perempuan. Medominasinya laki-laki membuktikan bahwa belum adanya reformasi politik. Kurangnya partisipasi kalangan perempuan di DPRD NTB rupanya masih dilatarbelakangi pemikiran bahwa politik hanya pantas bagi kalangan laki-laki saja bukan untuk perempuan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap bahwa keberadaan DPRD dan partai politik sebagai lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kepentingan rakyat bisa berjalan sebagaimana mestinya. Adanya tuntutan dan harapan yang besar dari masyarakat tidak terlepas dari kinerja, citra, dan performance DPRD

selama ini, yang memaksakan anggota dewan harus bekerja lebih maksimal dari sebelumnya.

Dengan adanya keinginan dari para anggota DPRD dan upaya yang sungguh-sungguh serta konsistennya anggota dewan untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih progresif, menciptakan secara tidak sadar apresiasi dan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kinerja lembaga anggota dewan oleh masyarakat. Maka dari itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- Partai politik perlu melakukan pendidikan politik secara optimal bagi para kader atau pegurus partai yang masih terbilang muda agar mampu bersaing pada kontestasi politik sehingga dapat membawa warna baru pada kursi legislatif NTB.
- 2. Komunikasi politik, sosialisasi politik mengenai politisi perempuan harus terus menerus dilakukan oleh partai politik agar keterwakilan dan partisipasi perempuan di legislatif dapat terus meningkat.
- 3. Untuk mengatasi persoalan publik yang berhubungan dengan kebijakan, sosial, politik, dan ekonomi perlu dilakukan keterbukaan informasi oleh lembaga DPRD agar nantinya tidak muncul pemikiran-pemikiran buruk dari masyarakat mengenai suatu kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Adit, & Zainal. (1998). Elite dan Modernisasi. Yogyakarta: Liberty.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darmansyah. (2002). DPRD dan Partai Politik, Studi Kasus Kabupaten Alor,

 Nusa Tenggara Timur. Mataram: Kerjasama Pusat Pengkajian Politik dan

 Otonomi Daerah (P3OD) Universitas Muhammadiyah Mataram dengan

 Friedrich Naumann Stiftung.
- Darmansyah. (2002). DPRD dan Partai Politik, Studi Kasus Kabupaten Lombok

 Barat, Nusa Tenggara Barat. Mataram: Kerjasama Pengkajian Politik dan

 Otonomi Daerah (P3OD) Universitas Muhammadiyah Mataram dengan

 Friedrich Naumann Stiftung.
- Darmansyah. (2002). *DPRD dan Partai Politik, Studi Kasus Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.* Mataram: Kerjasama Pengkajian Politik

 dan Otonomi Daerah (P3OD) Universitas Muhammadiyah Mataram

 dengan Friedrich Naumann Stiftung.
- Darmansyah. (2002). *DPRD dan Partai Politik, Studi Kasus Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.* Mataram: Kerjasama Pengkajian Politik dan

 Otonomi Daerah (P3OD) Universitas Muhammadiyah Mataram dengan

 Friedrich Naumann Stiftung.

- Gunawan, M. (2008). Buku pintar calon anggota & anggota legislatif, DPR, DPRD & DPD. Jakarta: Visimedia.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya offset.
- N, A. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah.
- Nadrilun. (2012). *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero).
- Putra, F. (2003). *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Rosyada, Dede, & dkk. (2003). Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education):

 Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE

 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sobari, W., & dkk. (2004). Inovasi Sebagai Referensi: Tiga Tahun Otonomi Daerah dan Otonomi Award. Yogyakarta: Nailil Printika.
- Surbakti, R. (2010). Memahami Imu Politik. Jakarta: PT Grasindo.
- Syaekhu, A., & Suprianto. (2021). *Teori Pengambilan Keputusan*. Yogyakarta: Zahir Publishing.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 3 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Pasal 1 ayat 4 Tahun 2004

 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wasistiono, S., & Wiyoso, Y. (2009). Meningkatkan Kinerja DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bandung: Fakusmedia.
- Wirosardjono, S. (1996). *Dialog dengan Kekuasaan : esai-esai tentang agama, negara, dan rakyat*. Bandung: Mizan.
- Yusnedi, & Utami, S. (2019). Buku Ajar Sosiologi Politik (Seri : Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia). Yogyakarta: Deepublish.

LAMPIRAN

















Profil Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2019-2024

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAPIL	TEMPA T, TANGG AL, LAHIR	JENIS KELA MIN	PEN DIDI KAN	JABATA N	PEKERJ AAN SEBELU MNYA
1	HJ. BAIQ ISVIE RUPAEDA, SH., MH.	GOLKAR	LOMB OK TIMUR A	DASAN LEKON G, 01- 09-1962	PERE MPUA N	S2	KETUA DPRD	Anggota DPRD
2	H.MORI HANAFI, SE., M.COMM	GERIND RA	DOMP U, BIMA, & KOTA BIMA	JAKAR TA, 30- 07-1970	LAKI- LAKI	S2	WAKIL KETUA DPRD	Anggota DPRD
3	DRS. H. MUZIHIR	PPP	MATA RAM	MAMBE N, 25- 12-1962	LAKI- LAKI	S1	WAKIL KETUA DPRD	Anggota DPRD
4	H. ABDUL HADI, SE.,MM	PKS	LOMB OK TIMUR A	TALIW ANG, 04-09- 1970	LAKI- LAKI	S2	WAKIL KETUA DPRD	Anggota DPRD
5	H. MAU'UD ADAM, SH	GOLKAR	LOMB OK TIMUR B	LOTIM, 13-12- 1964	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
6	IR. MISBACH MULYADI	GOLKAR	MATA RAM	PRAYA, 21-11- 1950	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
7	LALU AHMAD ISMAIL, SH.	GOLKAR	LOBA R & KLU	SEKOT ONG, 30-01- 1985	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
8	H. UMAR SAID,S.AG.	GOLKAR	LOBA R & KLU	OMBE DESE, 15-12- 1971	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD

9	IR. H. BUSRAH HASAN, MM.	GOLKAR	SUMB AWA BARA T & SUMB AWA	TALIW ANG SUMBA WA, 04- 01-1948	LAKI- LAKI	S2	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
10	DRS. H. A. HAFID	GOLKAR	DOMP U, BIMA, & KOTA BIMA	BIMA,3 1-12- 1963	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
11	H. ACHMAD PUADDI, FT., SH	GOLKAR	LOMB OK TENG AH A	KR. BEJELO , 06-08- 1968	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
12	LALU SATRIAWAND I, ST	GOLKAR	LOMB OK TENG AH A	PRAYA, 31-12- 1969	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
13	LALU AKHMAD YANI, SE	GOLKAR	LOMB OK TENG AH B	REMBIT AN, 23- 12-1970	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
14	DRS. H. RIDWAN HIDAYAT	GERIND RA	MATA RAM	DASAN AGUNG , 06-12- 1956	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	PNS
15	NAUVAR FURQONY FARINDUAN, SH. MBA.	GERIND RA	LOBA R & KLU	MALAN G, 15- 03-1982	LAKI- LAKI	S2	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
16	SUDIRSAH SUJANTO, S.PD.B., S.IP	GERIND RA	LOBA R & KLU	LENEK, 23-01- 1975	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
17	H. MACHSUN RIDWAYNI, S.SOS,.MBA.	GERIND RA	LOMB OK TIMUR A	MASBA GIK, 17- 7-1948	LAKI- LAKI	S2	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta

18	DRS. H. HAERUL WARISIN,M.SI	GERIND RA	LOMB OK TIMUR B	LOTIM, 01-07- 1963	LAKI- LAKI	S2	ANGGOT A DPRD	Wakil Bupati Lotim
19	H. ABDUL THALIB, S.SOS	GERIND RA	SUMB AWA BARA T & SUMB AWA	BIMA, 31-12- 1952	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Pensiunan PNS
20	LALU WIRAJAYA,	GERIND RA	LOMB OK TENG AH	BATUN YALA, 1701- 1982	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
21	LALU SUDIARTAWA N,SH	GERIND RA	LOMB OK TENG AH B	MANGK UNG, 02-05- 1964	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Wiraswast a
22	H. MUHAMMAD RUSLAN, SH.	PPP	LOBA R & KLU	BENGK EL SELAT AN, 01- 10-1957	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
23	DR. DRS.TGH. HAZMI HAMZAR, SH.,MH.	PPP	LOMB OK TIMUR A	MAMBE N LAUK, 20-01- 1957	LAKI- LAKI	S3	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
24	RUSLI MANAWARI	PPP	SUMB AWA BARA T & SUMB AWA	LAB. SUMBA WA, 04- 02-1968	LAKI- LAKI	SMA/ SEDE RAJA T	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
25	SYIRAJUDDIN , SH.	PPP	DOMP U, BIMA, & KOTA BIMA	SORO, 01-06- 1972	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD

26	MOH. AKRI, S.HI	PPP	LOMB OK TENG AH A	PAOK LOMBO K LOTEN G, 31- 12-1979	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
27	DRS. H. M. ADUNG	PPP	LOMB OK TENG AH B	PRAYA, 31-12- 1949	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
28	TGH. ACHMAD MUCHLIS	PKS	MATA RAM	KARAN G KATEN G, 01- 04-1958	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Wiraswast a
29	TGH. SATRIAWAN, LC.,MA	PKS	LOBA R & KLU	GERUN G, 17- 05-1972	LAKI- LAKI	S2	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
30	SAMBIRANG AHMADI, S.AG,. M.SI.	PKS	SUMB AWA BARA T & SUMB AWA	SUMBA WA, 05- 03-1975	LAKI- LAKI	S2	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
31	H. SYAMSUDDIN MAJID, SE.	PKS	DOMP U, BIMA, & KOTA BIMA	BIMA, 12-02- 1968	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
32	YEK AGIL	PKS	LOMB OK TENG AH A	PRAYA, 07-03- 1973	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
33	TGH. PATOMPO, LC.,MH	PKS	LOMB OK TENG AH B	RANGG AGATA, 31-12- 1970	LAKI- LAKI	S2	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
34	TGH. MAHALLI	DEMOKR AT	LOBA R &	PANCO R	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta

	FIKRI, SH		KLU	LOTIM, 31-12- 1959				
35	R. RAHADIAN SOEDJONO	DEMOKR AT	LOBA R & KLU	SELON G, 29- 10-1970	LAKI- LAKI		ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
36	H. ISMAIL,S.AP	DEMOKR AT	SUMB AWA BARA T & SUMB AWA	SUMBA WA, 08- 09-1958	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
37	H. A. RAHMAN H. ABIDIN,SE	DEMOKR AT	DOMP U, BIMA, & KOTA BIMA	BIMA, 31-12- 1966	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
38	ABDUL RAUF, ST.,MM	DEMOKR AT	DOMP U, BIMA, & KOTA BIMA	BIMA, 10-03- 1973	LAKI- LAKI	S2	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
39	H. MOH. RAIS ISHAK, SH.	DEMOKR AT	LOMB OK TENG AH A	KOPAN G, 28- 10-1964	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
40	LALU RIADI, S.SOS.	DEMOKR AT	LOMB OK TENG AH B	KETAR A, 31- 121959	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
41	H. LALU HADRIAN IRFANI, ST., M.Si	РКВ	LOMB OK TENG AH A	PRAYA, 20-12- 1979	LAKI- LAKI	S2	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
42	DRS. H. MUHAMMAD JAMHUR, M.Pd	PKB	LOBA R & KLU	LANGK O, 31- 12-1966	LAKI- LAKI	S2	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD

43	H. ABDUL WAHID	PKB	LOMB OK TIMUR A	MAMBE N DAYA, 31-12- 1967	LAKI- LAKI	SMA/ SEDE RAJA T	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
44	H. MAKMUN, S.PD., SH., M.KN.	PKB	LOMB OK TIMUR B	LENGA LUH, 31-12- 1971	LAKI- LAKI	S2	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
45	AKHDIANSYA H,S.HI	PKB	DOMP U, BIMA, & KOTA BIMA	DOMPU , 08-10- 1977	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
46	H. LALU PELITA PUTRA, SH.	PKB	LOMB OK TENG AH B	MANGK UNG LAUQ,0 1-04- 1968	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
47	MULTAZAM	NASDEM	LOBA R & KLU	MEDAS SANDIK , 08-05- 1981	LAKI- LAKI	D3/P ERPA JAKA N	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
48	H. MUHAMMAD KHAIRUL RIZAL,ST.,M.K OM	NASDEM	LOMB OK TIMUR A	LOTEN G,16-05- 1974	LAKI- LAKI	S2	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
49	H. BOHARI MUSLIM	NASDEM	LOMB OK TIMUR B	GERISA K, 05- 10-1973	LAKI- LAKI	SMA/ SEDE RAJA T	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
50	H. ASAAT ABDULAH, ST.	NASDEM	SUMB AWA BARA T & SUMB AWA	SUMBA WA, 14- 12-1958	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Pensiunan PNS

51	RAIHAN ANWAR, SE.,M.SI.	NASDEM	DOMP U, BIMA, & KOTA BIMA	BIMA,2 5-09- 1970	LAKI- LAKI	S2	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
52	H. HASBULLAH MUIS	PAN	LOBA R & KLU	BOLON G, 28- 12-1970	LAKI- LAKI	SMA/ SEDE RAJA T	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
53	H. SAEFUDDIN ZOHRI,S.AG	PAN	LOMB OK TIMUR A	BAGIK ENDEP, 17-08- 1971	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
54	H. NAJAMUDDIN MOESTAFA	PAN	LOMB OK TIMUR B	BATU SAMBA K, 30- 12-1969	LAKI- LAKI	SMA/ SEDE RAJA T	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
55	MUHAMMAD NASIR, ST.,MM.	PAN	SUMB AWA BARA T & SUMB AWA	JEREW EH, 28- 08-1968	LAKI- LAKI	S2	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
56	ADY MAHYUDI (Mengundurkan diri)	PAN	DOMP U, BIMA, & KOTA BIMA	BIMA, 08-03- 1970	LAKI- LAKI	SMA/ SEDE RAJA T	ANGGOT A DPRD	Wiraswast a
57	JALALUDDIN, S.SOS.	BEKARY A	LOMB OK TIMUR A	TEMBE NG PUTIK BARET, 03-05- 1975	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
58	A. KAHAR MUHAMAD RIFAI (Meninggal	BEKARY A	DOMP U, BIMA, &	BIMA, 25-09- 1977	LAKI- LAKI	SMA/ SEDE RAJA T	ANGGOT A DPRD	Wiraswast a

	Dunia)		KOTA					
			BIMA					
59	LALU BUDI SURYATA, SP.	PDI	SUMB AWA BARA T & SUMB AWA	AMPEN AN, 16- 09-1968	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
60	H. RADEN NUNA ABRIADI, S.IP.	PDI	LOBA R & KLU	KR.BED IL, 05- 10-1970	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
61	IR. H. MOH. EDWIN HADIWIJAYA, MM	РВВ	LOMB OK TIMUR A	SELON G, 12- 07-1966	LAKI- LAKI	S2	ANGGOT A DPRD	Wiraswas ta
62	DRS. H. RUSLAN TURMUZI	PDI	LOMB OK TENG AH B	PRAYA, 06-01- 1964	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
63	IR. MADE SLAMET, MM	PDI	MATA RAM	KARAN GASEM, 2-12- 1967	LAKI- LAKI	S2	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
64	AHMAD DAHLAN, S.SOS	HANURA	DOMP U, BIMA, & KOTA BIMA	RATO, 30-10- 1972	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD
65	H. JUNAEDI ARIF, SP.	PBB	LOBA R & KLU	DUSUN TODO, 02-05- 1969	LAKI- LAKI	S1	ANGGOT A DPRD	Anggota DPRD

PERDA NTB TAHUN 2019-2021

- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2021
 Tentang Pemajuan Kebudayaan
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2021
 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021
 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
 Tenggara Barat
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2021
 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat
 Tahun 2021 2041
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2021
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2021
 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2021
 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2021
 Tentang Pemakaian Jalan Untuk Kepentingan Masyarakat

- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021
 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2021
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
 Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun20212011 Tentang Pt. Gerbang Ntb Emas (Perseroda)
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
 Barat Tahun 2019- 2023
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2021
 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2020
 Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2020
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2020
 Tentang Pengawasan Dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan
 Yang Merusak Sumber Daya Perikanan

- 18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020
 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2020
 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengembangan, Pembinaan, Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Daerah
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2020
 Tentang Tata Niaga Ternak
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2020
 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2020
 Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Pt. Daerah Maju Bersaing
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penggabungan Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Menjadi Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019
 Tentang Pengelolaan Hutan
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang

- Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
 Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
 Barat
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2019
 Tentang Percepatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan
 Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak Dengan Rahmat Tuhan
 Yang Maha Esa
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2019
 Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2019
 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara